

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan keberadaan lahan pertanian memiliki peran strategis bagi Indonesia yang mayoritas makanan pokok penduduknya adalah beras.¹ Hal tersebut dibuktikan dengan luas lahan di Indonesia yang saat ini bukan lagi berupa kawasan hutan, tetapi telah menjadi lahan pertanian seluas 70,2 juta Ha yang terdiri atas sawah, tegalan, pekarangan, dan perkebunan. Luas lahan terlantar (lahan tidur) tercatat 11,3 juta Ha, sehingga lahan pertanian yang efektif hanya seluas 58,9 juta Ha.²

Beras merupakan makanan pokok hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di daerah pedesaan Indonesia, terdapat anggapan bahwa kenaikan nilai sosial sebuah keluarga dihubungkan dengan konsumsi beras sebagai makanan pokok. Anggapan ini menyebabkan jumlah kebutuhan akan beras terus-menerus meningkat. Penggunaan beras sebagai makanan pokok bukan tanpa alasan, terlebih bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Hal ini disebabkan beras memiliki kadar kalori dan protein yang cukup besar dibandingkan dengan bahan pangan lainnya.

¹ Agus, F. dan Irawan. *Agricultural land conversion as a threat to food security and environmental quality*. (Dalam Prosiding Multifungsi dan Revitalisasi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta, 2006). hal 101.

² Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis: Tinjauan Aspek Kesesuaian Lahan*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta: Edisi II, 2007). hal 30.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk yang semakin besar dan pengaruh kemajuan industri, tentunya kebutuhan akan lahan yang difungsikan sebagai lahan industri dan juga perumahan semakin meningkat yang menuntut adanya keseimbangan lingkungan, terutama di daerah perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,17% pada tahun 2022 dengan total jumlah penduduk 275,77 juta jiwa.³

Ketersediaan lahan yang dinilai cukup luas dan harga lahan yang masih rendah, menjadi keuntungan tersendiri dalam mengembangkan kawasan industri di daerah kabupaten sekitar kota. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahan utamanya adalah lahan yang dipakai untuk pembangunan kawasan industri tersebut adalah lahan pertanian yang masih produktif digunakan sebagai daerah bercocok tanam sebesar 3,1 juta Ha atau 42% lahan sawah akan terancam beralih fungsi.⁴

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah penghasil beras kedua di Indonesia yang dijuluki dengan kota lumbung padi nasional dan sebagian besar padi ditanam pada lahan sawah irigasi.⁵ Akan tetapi, seiring dengan terus meningkatnya angka pertumbuhan penduduk dan majunya sektor industri, menjadikan Karawang sebagai salah satu daerah yang terkena dampak pengalihfungsian dari lahan pertanian menjadi kawasan industri. Selaras dengan

³ Badan Pusat Statistik (BPS), melalui website www.bps.go.id, diakses pada 23 Juni 2023.

⁴ Winoto, J. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya. Seminar Sehari Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. Jakarta, 2005.

⁵ *Gambaran Umum Kabupaten Karawang*, <https://karawangkab.go.id>

hal tersebut, Karawang pada tahun 1990-an terkenal sebagai “Lumbung Padi”, sedangkan pada masa kini telah berubah menjadi “Kota Kawasan Industri” dengan luas lahan industri sebanyak 13.902,50 hektar. Penyusutan sawah di Karawang dalam rentang tahun 1993-2013 mencapai 2.000,56 hektar dengan rata-rata penyusutan mencapai 181,87 hektar pertahun.⁶

Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Karawang merupakan implementasi dari Keppres Nomor 53 Tahun 1989. Pada tahun 1990, dikeluarkan SK Gubernur Jawa Barat No.593 yang berisikan penetapan luas areal industri di Jawa Barat seluas 18.000 Ha. Karawang mendapatkan jumlah terbesar untuk lahan industri, yaitu 5.500 Ha. Pada periode 1989-1995 lahan sawah beralih fungsi sekitar 1.328 Ha. Kemudian pada periode 1996-2000 konversi mencapai 548 Ha. Adapun penggunaan luas lahan di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 diperinci menjadi 3 bagian, yaitu lahan sawah seluas 95.287 Ha, lahan pertanian bukan sawah sebesar 38.805 Ha, dan lahan bukan pertanian sebesar 41.167 Ha.

Tabel 1.1

Luas Lahan Pertanian Kabupaten Karawang Tahun 2015-2018

Tahun	2015	2016	2017	2018
Luas Lahan Sawah	96.482	95.906	95.536	95.287
Luas Pertanian Bukan Sawah	39.402	38.150	33.424	30.805

Sumber: Proyeksi Penduduk Karawang 2010-2020.

⁶ Lely Winarti, (2008). *Kontribusi Lahan Industri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta. hal.2.

Tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan luas lahan pertanian di Kabupaten Karawang, baik lahan sawah maupun lahan pertanian bukan sawah. Hal ini berarti bahwa terjadi pengalihfungsian lahan pertanian di Kabupaten Karawang. Dinilai sebagai daerah yang memiliki potensi yang optimal untuk dikembangkan sebagai kawasan industri yaitu di daerah Kecamatan Telukjambe, Klari dan Cikampek. Selain itu, Pemda Kabupaten Karawang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang Nomor 17 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang.⁷ Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang berfungsi sebagai penyelarasan antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan kecamatan serta sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah.

Sedangkan jika ditinjau dari kebijakan spasial yang terdapat dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang (1989/1990 - 1993/1994),⁸ maka Kabupaten Karawang dibagi menjadi 3 wilayah pembangunan (WP), yaitu WP Utara dengan Rengasdengklok sebagai pusat, WP Tengah Selatan dengan Karawang sebagai pusat, dan WP Timur dengan Cikampek sebagai pusat. Pusat disini adalah pusat pertumbuhan dalam berbagai bidang, seperti pemukiman dan jasa, yang berpotensi untuk menimbulkan pertumbuhan di wilayah-wilayah pembangunan tersebut.

Menjadikan Kabupaten Karawang sebagai salah satu pusat industri tampaknya telah dipertimbangkan dengan matang oleh para pengambil kebijakan.

⁷ PERDA Tingkat II Karawang, *Karawang dalam Angka 1991*. Kantor Statistik Kab. Karawang.

⁸ PERDA Tingkat II Karawang, *Karawang dalam Angka 1989-1994*. Kantor Statistik Kab. Karawang.

Selaras dengan perubahan Perda Kabupaten Karawang Nomor 5 tahun 2013 yang diganti dengan Perda Kabupaten Karawang Nomor 1 tahun 2016 tentang Izin Lokasi⁹, pada pasal 9 ayat 2 yang mengatur mengenai batas luas untuk permohonan izin lokasi mendirikan perusahaan yaitu kawasan untuk kegiatan industri paling luas 100 Ha dan kawasan untuk pertanian paling luas 1500 Ha. Sehingga pembangunan kawasan industri diyakinin tidak akan mengganggu kegiatan pertanian yang telah berabad-abad menjadi mata pencaharian kabupaten ini.

Industrialisasi merupakan kegiatan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan kegiatan ekonomi masyarakat Karawang sebelumnya, yakni sektor pertanian terutama pada masyarakat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel Karawang yang dominan mata pencahariannya ialah sebagai seorang petani.¹⁰ Seperti banyak diuraikan oleh para pakar sejarah, masuknya sistem baru pada suatu masyarakat, sedikit banyak akan direspon oleh masyarakat tersebut, sesuai dengan kerangka pemikirannya terhadap kenyataan yang dihadapinya. Terdapat tiga ukuran terjadinya perubahan menurut Perase¹¹, yaitu perubahan dalam dimensi ekonomi, dimensi struktural, dan dimensi kultural. Perubahan pada dimensi ekonomi yaitu perubahan penghasilan dari ikatan kekeluargaan ke perusahaan yang sebagian besar dependen pada pemasukan industri. Perubahan pada dimensi struktural yaitu perubahan keanggotaan yang hanya masyarakat

⁹ PERDA Kabupaten Karawang No 1 Tahun 2016.

¹⁰ Aniek Nurfitriani. (2012). *Pengaruh Industrialisasi Terhadap Kehidupan Ekonomi dan Sosial Masyarakat Petani di Kabupaten Karawang (1989-1997)*. Skripsi UI. hal. 24.

¹¹ Andrew Pearse dalam Teodor Shanin (Penyunting). (2018). *Peasants and Peasant Society*. New Zealand: Penguin Books Ltd. hal.70-71.

sekitar menjadi keanggotaan masyarakat yang bersifat nasional. Kemudian perubahan pada dimensi kultural yaitu terjadinya perubahan dari masyarakat yang homogen menjadi heterogen dengan adanya bermacam-macam suku bangsa dan budaya.

Di Desa Parungmulya, perubahan dimensi ekonomi terjadi pada perubahan pola penggunaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri merupakan salah satu contoh dari perubahan pola penggunaan lahan.

Tabel 1.2

**Luas Lahan Pertanian Kecamatan Ciampel (Hektar) dan Jenis Pengairan
Tahun 2014-2016**

Tahun	2014	2015	2016
Irigasi	490	490	420
Non Irigasi	362	362	432

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang

Tabel 1.3

Luas Lahan Pertanian Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel

Tahun	Luas		
	Sawah	Daratan	Jumlah
2020	99.00	3573.14	3672.14
2021	99.00	3573.14	3672.14

Sumber : Dinas Pertanian Kecamatan Ciampel

Tabel diatas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kecamatan Ciampel mengalami penyusutan pada tahun 2016, dan pada tahun 2020 - 2021 tidak ada peningkatan luas lahan pertanian di Desa Parungmulya, baik lahan sawah maupun lahan daratan.

Para petani menjual sawahnya kepada para investor disebabkan oleh lahan sawah yang mereka miliki akan dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Para petani yang mendapatkan uang ganti rugi mendapat kesempatan untuk membeli sawah di daerah lain, seperti di Kecamatan Tempuran, Rengasdengklok, Pedes, Rawamerta, dan Batujaya. Walau demikian, tidak semua petani membeli sawah didaerah lain, karena mendapatkan sawah yang dijual biasanya cukup lama hingga uang ganti rugi terpakai dan tidak mencukupi untuk membeli sawah. Para petani yang tidak membeli sawah lagi setelah mendapatkan uang ganti rugi mengubah matapencahariannya sebagai pedagang, buruh tani garap, jasa angkut, dan sebagainya.

Dari hasil penelitian, Dinas Pertanian Kecamatan Ciampel yang membandingkan antara pemilik lahan di Desa Parungmulya yang menjadi kawasan industri dan belum menjadi kawasan industri mendapati bahwa petani yang menjual tanahnya memiliki pendapatan tambahan lebih besar dibandingkan petani yang tidak menjual tanah. Petani yang menjual tanahnya mendapatkan penghasilan utama lebih besar dibandingkan dengan petani yang tidak menjual tanahnya karena mereka mendapatkan tanah yang produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jika sawah yang mereka beli jaraknya jauh dari tempat tinggal, biasanya mereka menyakapkan pada petani di daerah sekitar sawah

tersebut. Dengan demikian, para petani ini pun berkesempatan untuk mencari pendapatan di bidang lain, seperti perdagangan. Namun adapula, petani yang bersedia menjadi petani penggarap di lahan milik mereka yang telah dijual kepada investor dengan sistem sewa kepada perusahaan yang lahannya belum dijadikan kawasan industri.

Salah satu dampak ekonomi dari pengalihfungsian lahan pertanian ke kawasan industri di Desa Parungmulya yang menjadi faktor utama yaitu dalam mengganti mata pencaharian, yang tadinya berprofesi petani menjadi memilih bekerja di bidang industri karena banyaknya sektor industri. Menurut teori Irawan dan Santosa yang menyatakan bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian berakibat kepada petani yang akan kehilangan pendapatannya. Jika lahan dialihfungsikan, khususnya sawah produktif yang menyerap banyak tenaga kerja, maka pilihan pekerjaan akan berkurang, sehingga berdampak pada penurunan pendapatan petani. Aksesibilitas ekonomi rumah petani terhadap pangan tentu saja akan dirugikan ketika pendapatan petani menurun.¹²

Para petani yang memilih untuk berdagang. Kebanyakan mereka mendagangkan makanan dan minuman. Alasan mereka berdagang adalah Parungmulya semakin bertambah ramai dan mereka berpikir bahwa jika mereka berdagang, banyak orang yang akan membeli dagangan mereka. Mereka yang membuka usaha dagang biasanya mereka yang tidak bisa melamar pekerjaan di sektor industri karena berpendidikan rendah. Kondisi ini lah yang menyebabkan

¹² Purwaningsih, dkk, *Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Karanganyar Jawa Tengah*, Jurnal Agraris, Volume 1 Nomor 2 (2015), hal. 99.

perindustrian berakibat pada semakin pesatnya sektor-sektor ekonomi formal. Pada perkembangannya, di kecamatan yang dikhususkan untuk areal industri, sektor-sektor informal mulai meramaikan bukan hanya daerah ini tapi juga Karawang secara luas.

Para petani atau keluarganya yang memiliki pendidikan cukup tinggi, mereka melamar pekerjaan di perusahaan Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang. Pada masa awal industrialisasi, pelamar kerja berijazah SD masih dapat diterima. Kemudian, semakin berkembangnya perindustrian dan pemakaian alat-alat berteknologi tinggi, perusahaan memberikan kualifikasi yang lebih tinggi. Adanya kualifikasi ini menyebabkan masyarakat petani Desa Parungmulya tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja, padahal kawasan industri seluas 5.500 hektar diperkirakan akan menyedot tenaga kerja sebesar 1.100.000 orang.¹³ Ketidakmampuan masyarakat petani memenuhi kebutuhan tenaga kerja ini disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Karawang masih rendah yang menyebabkan masyarakat tidak mampu menghadapi perubahan yang terjadi.

Ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan industri ini kemudian dipenuhi oleh tenaga kerja dari luar Karawang. Para tenaga kerja ini kemudian menetap permanen dan sementara di Karawang. Arus migrasi penduduk dari luar Karawang semakin besar. Arus migrasi penduduk masuk ke Karawang ini lah yang dinamakan perubahan pada dimensi struktural. Perubahan pada dimensi kultural juga disebabkan oleh urbanisasi. Yang menyebabkan tata ruang

¹³ Agustinus Widanarto, (2015). *Kesiapan Pemerintah Daerah Desa di Kecamatan Telukjambe, Kabupaten Karawang DT II Karawang dalam Menanggapi Lonjakan Pendatang: Laporan Penelitian*. LIPI. hal. 34.

tempat tinggal menjadi tidak tertata, sehingga interaksi antar masyarakat petani menjadi lebih individualis.

Pengaruh industrialisasi, tentu saja, bukan hanya pengaruh sosial dan ekonomi, tetapi juga masalah lingkungan hidup yang akan berpengaruh pada masalah ekonomi. Sebagian besar petani merasakan bahwa telah terjadi pencemaran di lingkungan mereka, seperti pencemaran udara, gangguan kebisingan, dan pencemaran air di sungai-sungai oleh limbah industri. Pencemaran air sangat bermasalah bagi para petani, karena selain memanfaatkan hujan untuk pengairan, petani juga memanfaatkan sungai. Jika sungai tercemar, maka sawah pun akan tercemar dan akan mengakibatkan masalah-masalah seperti gagal panen atau sawah tidak dapat diolah lagi.

Dinas Pertanian Kabupaten Karawang terutama Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel telah melakukan solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan masyarakat petani dengan beberapa program, seperti program peningkatan ketahanan pangan, program peningkatan kesejahteraan petani, dan program sosialiasasi kelompok wanita tani pasca panen.¹⁴

Namun, program tersebut menemukan berbagai kendala yang menyebabkan solusi tidak berjalan secara optimal, diantaranya tidak serempaknya tanam, karena tidak sesuai dengan jadwal tanam yang telah ditetapkan pergolongan air, sehingga memicu merebaknya serangan organisme pengganggu

¹⁴ Iwan Setiawan (2012). *Dinamika Pemberdayaan Petani*. Hal. 55.

tanaman (OPT), karena rantai makanan OPT tidak terputus dan selalu tersedia, sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan produktivitas tanaman di daerah tertentu karena tingginya serangan OPT dan Bencana Alam.¹⁵

Selain itu, ada pula kendala lain seperti kandungan bahan organik pada lahan pertanian sangat rendah, kerusakan infrastruktur pertanian (irigasi, jalan usaha tani) yang hampir merata diseluruh wilayah, kurang mandiri nya kewirausahaan petani, masih rendahnya kompetensi kelompok tani dan kelembagaan penyuluhan, menurunnya minat generasi muda untuk terjun di bidang usaha pertanian, serta masih rendahnya tingkat inovasi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian terhadap penerapan paket teknologi pertanian spesifik lokasi. Sehingga menyebabkan, tingkat kesejahteraan masyarakat petani setelah adanya konversi lahan akibat industrialisasi tidak lebih baik.¹⁶

Dilihat dari realitas kondisi diatas, yang menjadi menarik perhatian dan menonjol yang diteliti oleh peneliti adalah adanya konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri menyebabkan terjadinya berbagai aspek perubahan dalam kehidupan masyarakat petani. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai bagaimana proses kehidupan masyarakat petani Desa Parungmulya, bagaimana kehidupan keseharian masyarakat petani setelah adanya Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang, bagaimana dampak perubahan sosial masyarakat petani, serta bagaimana hasil yang dicapai dengan adanya

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

perubahan sosial masyarakat petani Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Tingkat kesejahteraan masyarakat petani setelah adanya konversi lahan dari pertanian menjadi kawasan industri tidak lebih baik.
2. Peralihan status petani pemilik menjadi petani penggarap pada lahan yang disewakan oleh pihak perusahaan pada Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang serta peralihan mata pencaharian masyarakat petani.
3. Lonjakan urbanisasi yang menyebabkan tata ruang tempat tinggal tidak teratur akibat pembangunan rumah tinggal sementara.
4. Pola interaksi antar masyarakat petani menjadi lebih individualis.
5. Kerusakan lingkungan akibat polusi udara dan limbah perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, Karawang telah lama menjadi kota lumbung padi, munculnya industrialisasi tentu akan berdampak banyak pada kegiatan pertanian dan kehidupan masyarakat terutama masyarakat petani. Maka peneliti membuat rumusan masalah guna menguraikan pembahasan yang dibuat dengan bentuk pertanyaan berikut :

1. Bagaimana proses alihfungsi lahan pertanian Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang menjadi Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat petani Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana dampak perubahan sosial terhadap masyarakat petani Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian secara umum bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi dengan adanya pengalihfungsian lahan dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat desa. Adapun tujuan khusus penelitian berlandaskan rumusan masalah tersebut ialah :

1. Mengetahui bagaimana proses alihfungsi lahan pertanian Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang menjadi Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang.
2. Mengetahui bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat petani Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.
3. Mengetahui dampak perubahan sosial terhadap masyarakat petani Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan mempresentasikan penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat dianggap bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya, penelitian ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sosiologi. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi standar penelitian berikutnya yang kian memuaskan khususnya yang berhubungan dengan ilmu sosial (masyarakat) seputar teori perubahan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Praktisnya, penelitian ini dikehendaki bisa menyerahkan kontribusi ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas seputar perubahan sosial masyarakat petani Desa Parungmulya Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang disekitar Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang. Penelitian ini pun diinginkan bisa menciptakan ilustrasi seputar fenomena alam dan sosial utamanya masalah perubahan sosial di Kawasan Industri Mitra (KIM) Karawang pada masyarakat petani Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka tentu dibutuhkan dalam setiap proses konstruksi, baik itu rumah atau bangunan lain. Hal ini pun dibutuhkan untuk penelitian selaku rujukan untuk menetapkan fokus penelitian. Demi menjauhi pelebaran makna dan mengarah pada diskusi yang tidak fokus. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan teori yang dapat memperkuat dan mengkorelasikan

permasalahan yang tersedia. Teori tersebut yakni kontruksi sosial Berger dan Luckman.¹⁷

Perilaku sosial yang terlihat di masyarakat petani Desa Parungmulya ketika sebelum ataupun selepas pembangunan industri, dimana waktu itu penduduknya berprofesi menjadi petani (agraris) sebab hampir seluruh area desa itu ialah area persawahan dan pertanian dan sebab masih lapangnya area pertanian dan persawahan maka kependudukan belum padat. Berbeda dengan kini ketika area pertanian telah berubah manfaat menjadi area industri dan tempat tinggal penduduk. Ketika itu juga masyarakat masih begitu menjaga rasa kekeluargaan dan sikap gotong royong antar sesama, komunikasi dan hubungan antar masyarakat tetap berlangsung apik, berbeda dengan kini yang makin meredup dan masyarakat petani berubah kian individualis.

Dalam bidang pertanian, lahan tanah merupakan salah satu faktor produksi yaitu digunakan sebagai tempat dihasilkan produk pertanian yang dijalankan oleh usaha tani dan hasil produksinya dipengaruhi oleh luas sempitnya lahan yang digunakan dalam produksi tersebut.¹⁸ Alih fungsi lahan merupakan proses perubahan yang menggunakan atau atas lahan untuk meningkatkan nilai manfaat dari sebuah lahan. Menurut Nugroho yang dijelaskan mengartikan alih fungsi lahan sebagai sebuah mekanisme yang memerlukan permintaan dan penawaran lahan atau yang biasa disebut dengan

¹⁷ Berger, L. Peter dan Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book, 2010. hal 167.

¹⁸ Rika Harini, dkk, Analisis Lahan Pertanian Terhadap Produksi Padi di Kalimantan Utara, *Jurnal Kawistara*, Volume 9 Nomor 1, 2019, hal. 19.

negosiasi. Mekanisme tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor fungsi yang mendorong terjadinya alihfungsi lahan.¹⁹

Iwan Isa menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya alihfungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, diantaranya:²⁰

1. Kependudukan : semakin meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan meningkatkan permintaan kebutuhan lahan untuk difungsikan sebagai perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Begitupun dengan peningkatan taraf hidup masyarakat juga memerlukan suatu lahan.²¹
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non-pertanian seperti digunakan untuk kawasan industri, kawasan perdagangan dan lain sebagainya yang tentunya memerlukan lahan yang luas.²²
3. Ekonomi : faktor ini berasal dari tingginya *land rent* yang dihasilkan dari kegiatan sektor non-pertanian dibandingkan dengan sektor pertanian.²³ Rendahnya insentif untuk usaha tani salah satunya disebabkan oleh relatif rendahnya harga hasil pertanian yang berfluktuasi sementara biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi.
4. Faktor sosial dan budaya : adanya hukum waris yang membagikan harga atau tanah (biasanya lahan pertanian) menyebabkan

¹⁹ Linda Cristi Carolina, dkk. *Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan (Studi Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Volume 2 Nomor 2, hal. 225.

²⁰ Randa Nurianansyah Putra, *Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan.*, 3 Nomor 2, 2015, hal. 7.

²¹ *Ibid.*, hal 8.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

terfragmentasinya tanah pertanian, pada akhirnya tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang dinilai menguntungkan.²⁴

5. Degradasi Lingkungan : degradasi atau penurunan lingkungan terjadi karena kemarau panjang yang dapat mengakibatkan kekurangan air untuk pertanian terutama pada wilayah sawah yang notabene memerlukan banyak air, penggunaan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada meningkatnya serangan hama akibat musnahnya predator alami, serta adanya pencemaran air irigasi.²⁵
6. Otonomi daerah yang lebih mengutamakan pembangunan pada sektor jangka pendek sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan cenderung mendorong pengalihfungsian lahan pertanian menjadi non-pertanian.²⁶
7. Lemahnya kebijakan dan penegakkan hukum yang telah ada yang mengatur tentang pengendalian alih fungsi lahan.²⁷

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi masyarakat tempat wilayah tersebut dialihfungsikan. Perubahan sosial menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi yaitu semua perubahan dalam pranata sosial masyarakat yang

²⁴ *Op.cit.*, hal 9.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Op.cit.*, hal 10.

dipengaruhi oleh perubahan sistem sosial, termasuk perubahan nilai, sikap, dan pola perilaku individu dan masyarakat dalam kelompok sosialnya.²⁸

Aspek teori Himes dan More seperti dimensi struktural, dimensi kultural, dan dimensi interaksional dapat digunakan untuk mempelajari perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat Desa Parungmulya.²⁹

1. Dimensi Struktural

Dalam dimensi struktural, menilai bahwa perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan perubahan struktural yang berada dalam masyarakat.³⁰ Yang menyangkut perubahan dalam peranan sehingga menghasilkan peranan baru, peranan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan lembaga sosial. Perubahan tersebut dinilai dengan melihat bertambah dan berkurangnya peranan dalam masyarakat yang menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, terjadinya modifikasi saluran komunikasi diantara peranan, dan terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya fungsi masyarakat sebagai akibat dari struktur tersebut.

Perubahan sosial dari dimensi struktural diantaranya pendidikan, mata pencaharian, ekonomi, status dan peran, stratifikasi sosial, kesetaraan gender, dan disintegrasi sosial.³¹

2. Dimensi Kultural

²⁸ Siti Cholifah dan Sugeng Harianto, *Perubahan Sosial Masyarakat Desa Jamprong Pasca Pendirian SMP Satu Atap*, Jurnal Paradigma, Volume 5 Nomor 3, 2017, hal. 7.

²⁹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial (Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial)* Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 6-8.

³⁰ *Ibid.*, hal 10.

³¹ *Ibid.*, hal. 11.

Perubahan sosial dilihat dari dimensi kultural akan menimbulkan terjadinya inovasi budaya.³² Inovasi budaya ini ditandai dengan adanya teknologi baru sehingga dapat merubah gaya hidup pada masyarakat dengan kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Dari perubahan gaya hidup tersebut akan memunculkan difusi. Difusi adalah faktor eksternal yang dapat menggerakkan terjadinya perubahan sosial tersebut. Adanya inovasi budaya tentunya dipengaruhi oleh budaya lain sehingga bisa timbul pergeseran nilai dan norma pada masyarakat. Adapun perubahan sosial yang terdapat dalam dimensi kultural adalah gaya hidup, pergeseran budaya, pola pikir, dan penyimpangan sosial.³³

3. Dimensi Interaksional

Perubahan sosial dilihat dari dimensi interaksional penilainnya mengacu pada hubungan sosial di dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi perubahan dalam frekuensi.³⁴ Perkembangan teknologi menyebabkan berkurangnya frekuensi individu untuk saling bertatap muka karena semua kebutuhan untuk berinteraksi telah dipenuhi dengan adanya teknologi. Selain itu dimensi ini, menyebabkan terjadinya perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Alihfungsi lahan pertanian akan membawa konsekuensi yang luas, antara lain perubahan struktur pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan lahan, dan pergeseran struktur ekonomi dari pertanian ke industri, serta mobilitas penduduk.

³² *Op.cit.*, hal 13.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Op.cit.*, hal 18.

Dari segi ekonomi, hal itu akan mengganggu ketahanan pangan produksi pertanian. Beberapa petani akan kehilangan pekerjaan, mengurangi daya beli mereka, karena tidak selalu petani yang mendapat pekerjaan lebih baik.³⁵

Transformasi ekonomi ditinjau dari perspektif penduduk asli dan penduduk pendatang. Sementara itu, mata pencaharian, keterampilan, kerabat, kelembagaan, strata sosial, kontrol sosial, dan mobilitas penduduk semuanya dapat dianggap sebagai indikator transformasi sosial. Segala macam solusi untuk menyelesaikan problematika dalam proses perubahan masyarakat petani, adalah mensosialisasikan solusi dengan baik.³⁶

Menurut Berger dan Luckman, suksesnya sosialisasi terletak pada kekuatan simetri antara dunia objektif masyarakat dengan subjektif individu.³⁷ Selanjutnya Berger dan Luckman, menegaskan bahwa realitas subjektif sebagaimana yang terjadi sesungguhnya harus dipertahankan, karena sosialisasi menunjukkan adanya alternatif bahwa realitas subjektif bisa ditransformasikan. Dengan demikian, nampak jelas bahwa jika sosialisasi belum bisa mencapai tujuan menginternalisasi suatu masyarakat tertentu, maka hampir bisa dipastikan masyarakat tersebut tidak bisa mencapai tujuannya membentuk tradisi apalagi bisa menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada.

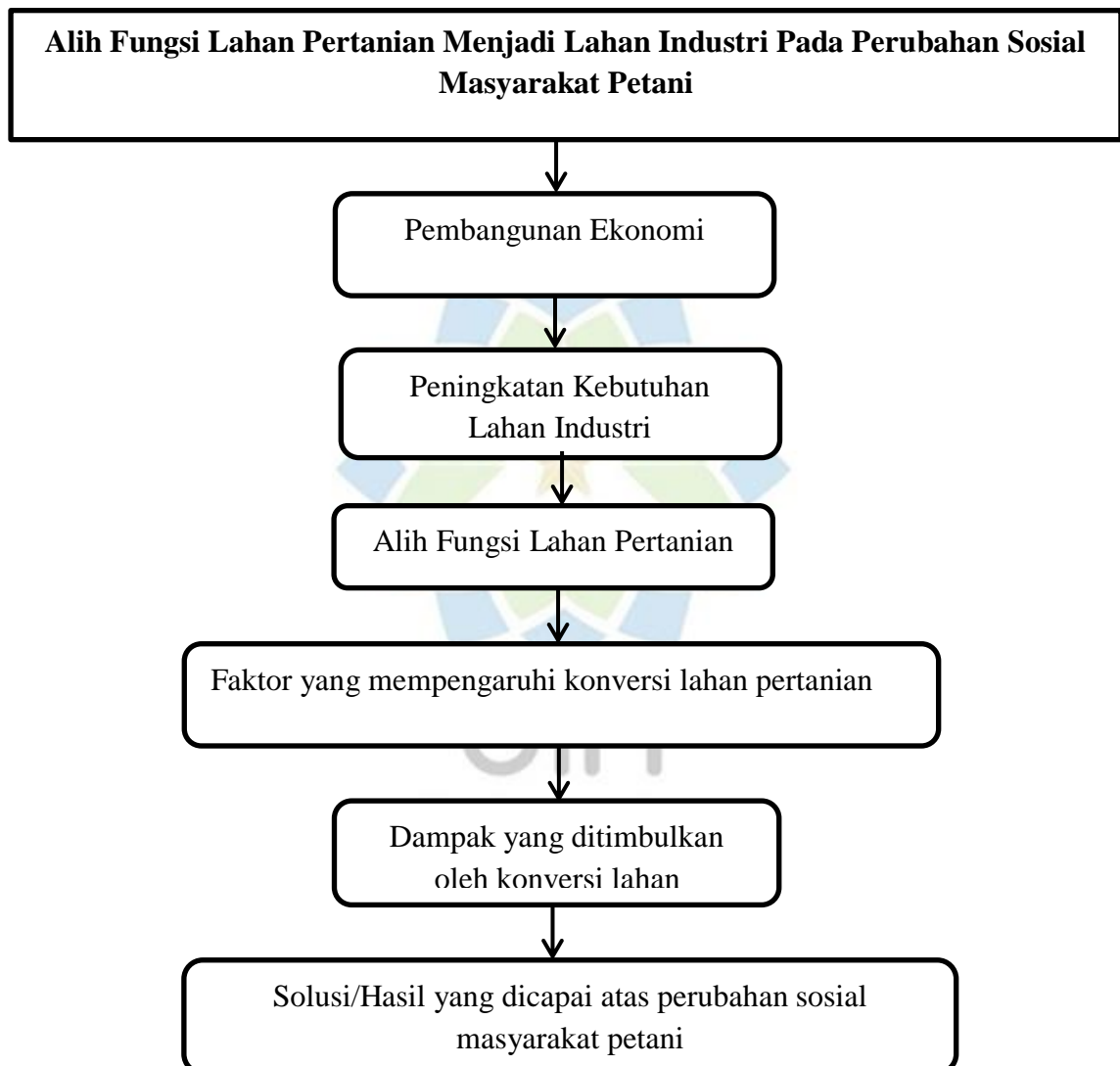
³⁵ Nurma Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, *Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran Di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*, Laredem : Jurnal Wilayah dan Lingkungan, Volume 1 Nomor 2, 2013, hal. 179.

³⁶ *Ibid.*, hal 182.

³⁷ Berger, L. Peter dan Luckmann, Thomas. *The Social Construction of Reality*. Unites States: Anchor Book, 2010. hal 197.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam gambar kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Konseptual Kerangka Berpikir



(Sumber : Oleh peneliti)